

REFORMULASI HARGA TBS: SOLUSI UNTUK MENYEJAHTERAKAN PEKEBUN SAWIT RAKYAT

Oleh
Tim Riset PASPI

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir harga CPO dunia mengalami penurunan. Penurunan harga CPO dunia ini, ditransmisikan kedalam negeri dengan penurunan harga TBS sawit rakyat. Jika dibandingkan dengan pekebun sawit plasma, harga TBS yang diterima petani sawit swadaya hanya sekitar 60-70 persen dari harga TBS tingkat PKS, akibat lokasi yang jauh dari PKS. Penurunan harga TBS di beberapa sentra produksi sawit juga berimplikasi pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi rasio harga minyak goreng curah dengan CPO (bahan bakunya) menunjukkan peningkatan, yang berarti harga minyak goreng curah relatif makin mahal terhadap harga CPO. Hal yang sama terjadi pada biodiesel sawit (FAME) harga biodiesel relatif terhadap harga CPO. Untuk mengatasi dan mencegah masalah penurunan harga TBS berkepanjangan, pemerintah perlu mengambil kebijakan, pemerintah perlu melakukan reformulasi terhadap formula penetapan harga TBS saat ini (Permentan No.01/2018). Untuk formula harga TBS yang baru selain variabel harga CPO dan PKO, juga perlu memasukkan variabel harga minyak goreng sawit dan harga biodiesel sawit. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat peningkatan mandatory biodiesel dari B20 ke B30 untuk meningkatkan penyerapan CPO domestik sehingga dapat mengangkat harga ditingkat petani. Dan solusi kedepan adalah mengembangkan PKS greenfuel di sekitar petani sawit (sehamparan).

Keywords : harga TBS, pekebun plasma, pekebun swadaya, harga MGS, harga biodiesel, harga CPO

PENDAHULUAN

Perkebunan sawit rakyat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir ini. Pada akhir tahun 1970-an, belum ada yang namanya sawit rakyat dalam statistik Indonesia. Namun saat ini pangsa perkebunan sawit rakyat mencapai 41 persen (2017). Berdasarkan Statistik Kelapa Sawit (2018), luas kebun sawit rakyat meningkat dari hanya sekitar 6 ribu hektar tahun 1980 menjadi 5.8 juta hektar pada tahun 2018. Pekebun sawit rakyat berhasil membuat sejarah dalam perkembangan ekonomi nasional bahkan mampu membawa Indonesia menjadi raja CPO dunia dan pemimpin pasar minyak nabati dunia.

Perkembangan kebun sawit rakyat dimulai dari kebun sawit percontohan yang dibuat Pemerintah RI pada akhir tahun 1970-an yakni dalam bentuk NES I-IV, yang kemudian dilanjutkan dengan serial PIR (PIRLOK, PIRSUS, PIR TRANS, PIR KKPA dan seterusnya). Melalui kebun-kebun sawit percontohan tersebut, telah melahirkan wajah baru perkebunan sawit Indonesia yang ditandai dengan makin besarnya peran rakyat sebagai aktor industri sawit nasional.

Sawit rakyat yang tumbuh daerah pelosok, pinggiran, terpencil dimana kehidupan ekonomi belum berkembang mampu menjadi "obor" dalam perekonomian desa. Kontribusi sawit rakyat yang besar dalam perkembangan industri sawit nasional, juga turut berdampak pada pembangunan ekonomi daerah pedesaan melalui peningkatan pendapatan, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan (PASPI, 2016). Artinya melalui kebun sawit, rakyat mampu menyejahterakan dirinya dan keluarganya namun juga mampu menjadi pioner aktor ekonomi di daerah-daerah pinggiran dan terpencil.

Namun, saat ini harga CPO di pasar dunia mengalami penurunan yang disebabkan karena kelebihan stok. Harga CPO dunia hingga pertengahan tahun 2019 ini juga belum menunjukkan tren yang menggairahkan bahkan cenderung menurun. Tren penurunan harga (riil) CPO dunia ini juga diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2025 dengan rata-rata penurunan

sebesar 0.35 persen per tahun (Worldbank, 2019). Penurunan harga CPO di pasar internasional ini tentu saja berdampak pada pelaku pasar di Indonesia khususnya produsen baik perusahaan maupun pekebun rakyat.

Menurut Permentan No. 14/Permentan/OT.140/2/2013 dan Permentan No. 01/2018, salah satu komponen yang menentukan harga TBS yakni harga CPO pada penjualan ekspor (pasar internasional). Artinya penurunan harga di pasar internasional akan ditransmisikan kepada produsen TBS domestik melalui penurunan harga TBS. Penurunan harga TBS dan CPO juga berimbas pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) di beberapa sentra produksi sawit rakyat. Kondisi ini menjadi salah satu ciri penurunan kesejahteraan pekebun rakyat. Kondisi perkebunan sawit Indonesia yang didominasi perkebunan rakyat sehingga penurunan harga CPO dunia ini akan mempengaruhi perekonomian rumah tangga petani sawit di pedesaan (PASPI, 2018).

Di sisi lain, sebaliknya harga produk hilir berbasis sawit seperti minyak goreng sawit (MGS) relatif tinggi dan cenderung stabil. Selain MGS, biodiesel yang juga merupakan produk turunan sawit menunjukkan tren (permintaan) pasar yang terus meningkat. Kedua hal ini menunjukkan pasar produk hilir sawit dalam kondisi yang prima dimana seharusnya mampu meningkatkan harga CPO dan TBS di pasar domestik. Namun, realitanya produsen khususnya pekebun rakyat masih menerima harga TBS yang rendah.

Berdasarkan paparan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan formulasi baru dalam rangka menyejahterakan produsen khususnya pekebun rakyat melalui kelembagaan harga TBS. Hal ini penting dilakukan karena pekebun rakyat khususnya yang tidak memiliki PKS, hanya mampu menjual produk dalam bentuk TBS. Sedangkan saat ini formulasi harga TBS dianggap belum mengakomodasi tren pasar di pasar dunia maupun pasar domestik, sehingga harga TBS dinilai *underestimate* dan diduga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada kesejahteraan pekebun rakyat.

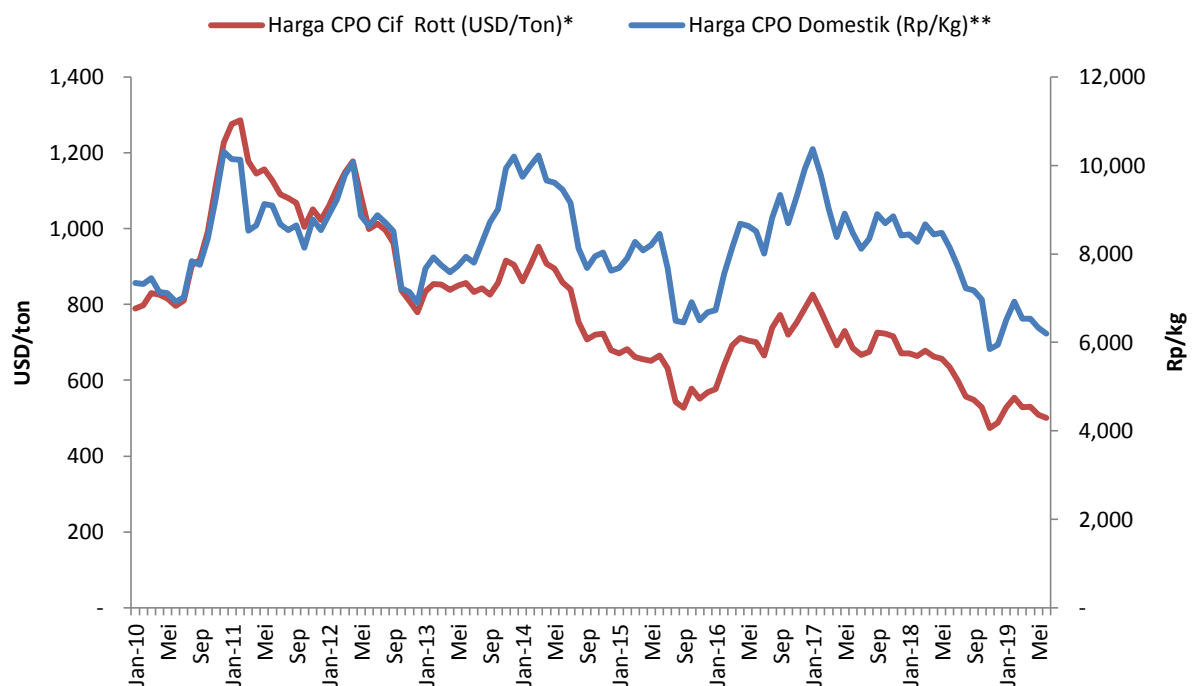
PERKEMBANGAN HARGA CPO DAN TBS

Minyak sawit yang menjadi industri strategis nasional, diperdagangkan secara internasional sehingga memiliki harga CPO dunia. Harga CPO dunia ini mempengaruhi harga CPO dalam negeri dan harga TBS di tingkat petani sawit. Kondisi harga CPO dunia menjadi perhatian pelaku usaha industri sawit dan pemerintah karena dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dimana industri sawit merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi Indonesia.

Harga CPO dunia pada tahun 2016 dan 2017 secara rata-rata berada di atas USD 700/ton. Bagi negara eksportir minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia, harga CPO dunia yang tinggi akan menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspor minyak sawit. Namun memasuki periode tahun 2018, ternyata harga CPO dunia terus menunjukkan trend

penurunan. Menurut GAPKI (2018), faktor pemicu menurunkan harga CPO dunia karena melimpahnya stok minyak nabati dunia termasuk minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, perang dagang antara USA dan China, lemahnya daya beli karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor dan adanya regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor yang turut andil terhadap penurunan harga.

Namun harga CPO CIF Rotterdam yang menjadi salah satu harga rujukan pasar dunia, saat ini sedang mengalami penurunan cukup drastis. Harga CPO CIF Rotterdam (dunia) pada bulan Juni 2019 ini berada di rata-rata USD 501 per ton, bahkan harga CPO pernah mencapai USD 474 per ton pada November 2018 dimana harga tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2010 (Gambar 1).



Gambar 1. Tren Penurunan Harga CPO CIFF Rotterdam dan Domestik (Sumber: MPOB*, BAPPEPTI**, 2019)

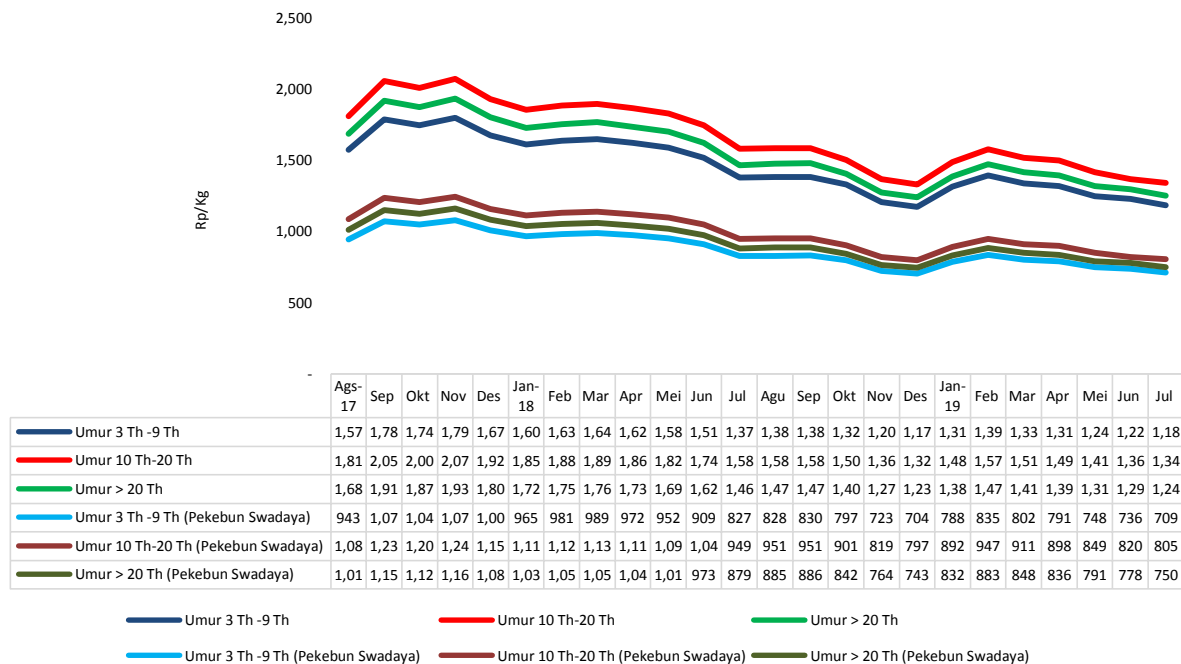
Harga CPO domestik diturunkan dari harga CPO dunia dengan rasio sekitar 90-96 persen. Perkembangan harga CPO domestik juga mengikuti tren penurunan harga CPO dunia, yakni dari Rp 7,340 per kg (Januari 2010) menjadi Rp 5,940 per kg (Juni 2019). Pada harga CPO dunia terendah (November 2018) juga menunjukkan harga CPO

domestik yang paling rendah yakni sebesar Rp 5,852 per kg.

Sama seperti harga CPO domestik, harga TBS di pasar domestik juga pada dasarnya merupakan harga turunan (*derived price*) dari harga minyak sawit mentah (CPO) pasar internasional. Seiring dengan penurunan harga CPO dunia dan domestik yang mengalami penurunan, harga TBS juga

menunjukkan tren penurunan (Gambar 2) pada setiap kelompok umurnya. Selama periode Agustus 2017-Juli 2019, harga TBS umur 3-9 tahun menurun dari Rp 1,572 per kg menjadi Rp 1,182 per kg, harga TBS umur

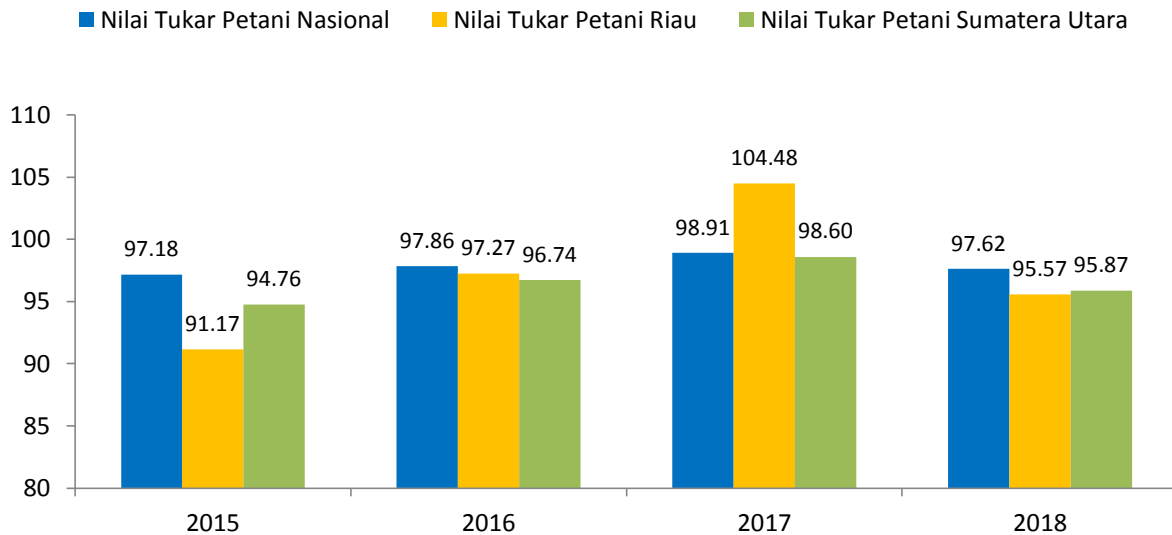
10-20 tahun juga menurun dari Rp 1,810/kg menjadi Rp 1,341 per kg dan penurunan harga TBS umur diatas 20 tahun dari Rp. 1,685/kg menjadi Rp. 1,249/kg.



Gambar 2. Perkembangan Harga TBS Berdasarkan Kelompok Umur

Jika dibandingkan dengan pekebun sawit plasma, harga TBS yang diterima oleh pekebun sawit swadaya lebih rendah dengan proporsi harga 60 persen dari harga TBS plasma. Harga TBS swadaya juga menurun dari Rp 943 per kg menjadi Rp 7-9 per kg (TBS umur 3-9 tahun), dari Rp 1,086 per kg menjadi Rp 805 per kg (TBS umur 10-20 tahun) dan dari Rp 1,011/kg menjadi Rp 750 per (TBS umur diatas 20 tahun). Hal ini menunjukkan penerimaan pekebun sawit swadaya lebih rendah dibandingkan plasma. Padahal proporsi kebun swadaya yang lebih besar (sekitar 75 persen dari luas areal sawit rakyat), artinya sebagian besar pekebun rakyat di Indonesia memiliki penerimaan yang rendah dari penjualan TBS.

Penurunan harga TBS di beberapa sentra produksi sawit berimplikasi pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan (Gambar 3). NTP perkebunan di Riau mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2017 yakni dari 97.18 persen menjadi 104.48 persen, namun seiring dengan penurunan harga TBS pada tahun 2018 berdampak juga pada NTP yang mengalami penurunan menjadi 95.57 persen. Begitu pula dengan NTP perkebunan Sumut yang mengalami peningkatan dari 94.76 persen (2015) menjadi 98.6 persen (2017) dan mengalami penurunan menjadi 95.87 persen (2018).



Gambar 3. NTP Sektor Perkebunan Rakyat yang Mengalami Penurunan (Sumber: BPS, berbagai tahun)

NTP pada provinsi sentra sawit tahun 2018 yang menunjukkan skornya kurang dari 100, memiliki interpretasi bahwa pendapatan lebih rendah dibandingkan pengeluarannya. Konsep NTP ini juga kuat relasinya dengan daya beli, artinya jika NTP mengalami penurunan maka daya beli juga menurun dan berimplikasi pada penurunan kesejahteraan.

Hal ini menunjukkan, kondisi penurunan harga CPO dunia yang menyebabkan harga CPO domestik dan TBS mengalami penurunan akan berdampak pada daya beli pekebun yang menurun sehingga kesejahteraannya juga mengalami penurunan.

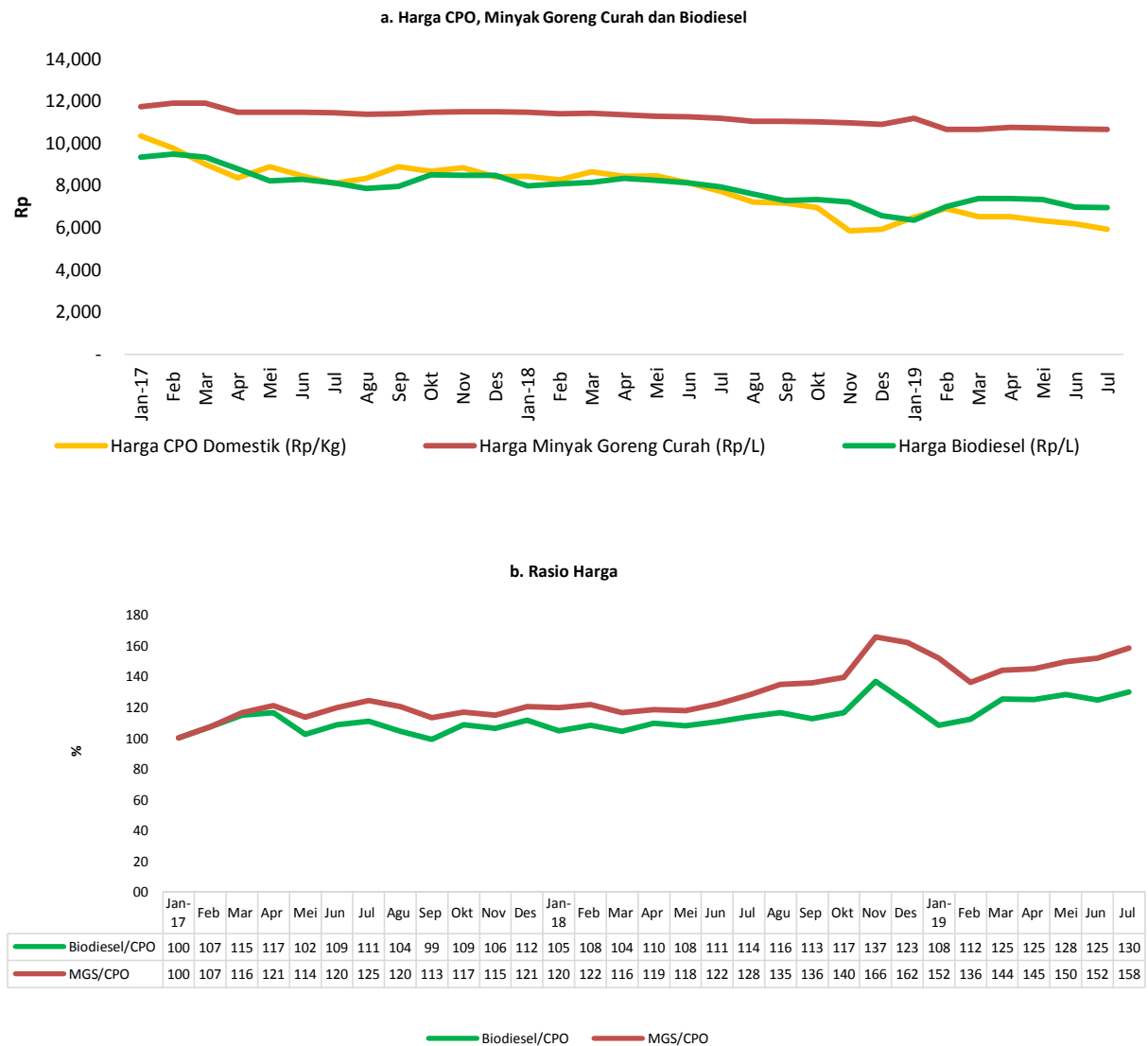
PERKEMBANGAN HARGA PRODUK HILIR SAWIT

Salah satu produk hilir berbasis sawit yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah minyak goreng sawit (MGS). Kapasitas produksi industri minyak goreng Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai 55 juta ton (Kemenperin, 2019). Produksi MGS juga mengalami peningkatan dari 5.4 jutan ton (2014) menjadi 6.9 juta ton (2018) (Sipayung, 2018). MGS juga sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dan diperkirakan akan terus

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan populasi penduduk Indonesia.

Selain MGS, produk hilir berbasis sawit yang baru dikembangkan Indonesia selama satu dekade terakhir ini adalah biodiesel. Selain untuk menciptakan ketahanan energi nasional, pengembangan produksi biodiesel di Indonesia juga bertujuan untuk mengurangi ekspor dan stok CPO di dunia sebagai upaya untuk meningkatkan harga CPO dunia. Produksi biodiesel Indonesia mengalami peningkatan dari 3.9 juta kiloliter (2010) menjadi 5.6 juta kiloliter (USD, 2019), bahkan kapasitas produksi biodiesel Indonesia sudah mencapai 12 juta kiloliter (Kemenperin, 2019). Dengan kapasitas pabrik yang tersedia dan seiring dengan peningkatan *blending rate* maka penyerapan CPO domestik diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Harga merupakan sebuah instrumen yang penting dalam perdagangan. Secara teoritis, harga input/bahan baku harus lebih rendah dibandingkan harga outputnya. Begitu pula pada harga MGS dan biodiesel (output) yang berada diatas harga CPO domestik (Gambar 4). Tren harga MGS dan biodiesel menunjukkan penurunan sama seperti harga CPO domestik, namun laju penurunannya harga MGS (0.31 persen per tahun) dan harga biodiesel (0.9 persen per tahun) lebih rendah dibandingkan laju penurunan harga CPO domestik (1.7 persen per tahun).



Gambar 4. Harga CPO, MGS dan Biodiesel Domestik dan Rasio

Berdasarkan perhitungan rasio output terhadap input dengan tahun dasar 2017, menunjukkan rasio harga MGS terhadap CPO meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 58 persen pada Juli 2019, sedangkan rasio harga biodiesel relatif terhadap harga CPO mencapai 30 persen (4b). Data tersebut menunjukkan bahwa harga produk hilir (MGS dan biodiesel) lebih tinggi dibandingkan harga input (CPO) dengan harga produk hilir yang terus mengalami peningkatan sedangkan harga CPO nya cenderung mengalami penurunan. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan harga produk hilir tersebut tidak ditransmisikan kepada harga CPO domestik.

Pasar produk CPO dan turunannya di Indonesia juga menunjukkan anomali (tidak sesuai dengan teori ekonomi). Contoh

kasusnya, produksi MGS dan biodiesel mengalami peningkatan setiap tahun artinya untuk memproduksi produk hilir tersebut membutuhkan input yakni CPO yang juga meningkat. Dalam teori ekonomi, peningkatan permintaan CPO akan meningkatkan harga CPO yang akan ditransmisikan menjadi peningkatan harga TBS (*derived demand*). Namun dalam realitanya, teori ekonomi tersebut tidak berlaku dalam industri sawit Indonesia. Hal ini dikarenakan harga CPO domestik dan harga TBS lebih dipengaruhi oleh harga internasionalnya. Hal ini sesuai dengan salah satu penelitian Imanuel (2018) yang menyatakan harga CPO domestik dipengaruhi oleh harga CPO dunia baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang dan pasar CPO domestik terintegrasi dengan pasar CPO global.

SOLUSI: REFORMULASI HARGA TBS

Harga CPO domestik dan harga TBS merupakan turunan dari harga CPO dunia, dimana harga tersebut hasil mekanisme *supply* dan *demand* yang terjadi di pasar dunia. Bagi perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang memiliki pabrik kelapa sawit (PKS), output yang diperdagangkan sudah dalam bentuk minyak sawit (CPO) sehingga harga jualnya dapat berdasarkan harga internasional. Namun, berbeda dengan pekebun sawit rakyat khususnya tidak memiliki PKS yang menjual produksinya dalam bentuk TBS. Sehingga untuk memformulasikan harga TBS, pemerintah mengeluarkan kebijakan Permentan No. 14/2013 dan Permentan No. 01/2018, yakni sebagai berikut:

$$H \text{ TBS} = K \{H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is}\}$$

dimana,

$H \text{ TBS}$: Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%)

H_{ms} : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg

R_{ms} : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%)

H_{is} : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg

R_{is} : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%)

Dalam formulasi harga tersebut hanya mengakomodasi harga internasional dan rendemen minyak/*oil extraction rate* yang disesuaikan umur tanaman kelapa sawit. Formulasi tersebut tidak melakukan mitigasi terhadap resiko tren penurunan harga internasional. Padahal jika harga CPO dunia menurun maka akan berdampak pada harga TBS yang juga menurun, dan hal ini akan merugikan produsen.

Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi harga TBS dengan mengakomodasikan harga MGS dan biodiesel sebagai produk hilir berbasis sawit. Sipayung (2018) juga menyarankan untuk turut juga memperhitungkan biomassa yang selama ini dianggap limbah seperti tandan kosong, serat buah, bungkil inti sawit, cangkang, daging inti sawit dan lumpur sawit. Hal ini dikarenakan proporsi berat biomassa tersebut cukup besar yakni sekitar 75 persen dan biomassa tersebut makin memiliki nilai ekonomi.

Reformulasi harga TBS dengan mengakomodasi baik produk hilir maupun produk biomasanya bertujuan untuk mencegah *underestimate* sehingga harga yang diterima oleh produsen (khususnya pekebun sawit rakyat) lebih tinggi dan tidak bergantung pada harga internasional.

Selain itu saat ini, pemerintah perlu mempercepat peningkatan mandatory biodiesel dari B20 ke B30 untuk meningkatkan penyerapan CPO domestik sehingga dapat mengangkat harga ditingkat petani. Hasil simulasi (PASPI, 2019) menunjukkan peningkatan B-20 menjadi B-30 dapat efektif mendongkrak harga TBS petani sawit. Implikasinya adalah tingkat kesejahteraan pekebun rakyat (baik swadaya maupun plasma) meningkat.

Dan untuk solusi kedepan adalah mengembangkan PKS greenfuel di sekitar petani sawit (sehamparan). PKS ini menghasilkan bahan baku untuk green fuel (diesel sawit, bensin sawit, avtur sawit) yang dipasok langsung ke depo-depo Pertamina provinsi. Setidaknya 40 persen tambahan benefit akan dinikmati petani sawit rakyat dengan PKS greenfuel tersebut.

KESIMPULAN

Dalam beberapa tahun terakhir harga CPO dunia mengalami penurunan bahkan harga CPO pernah mencapai USD 474 per ton pada November 2018. Penurunan harga CPO dunia ini, ditransmisikan kedalam negeri dengan penurunan harga TBS sawit rakyat. Pada Agustus 2017-Juli 2019, harga TBS umur 3-9 tahun menurun dari Rp 1,572 per kg menjadi Rp 1,182 per kg, harga TBS umur 10-20 tahun juga menurun dari Rp 1,810/kg menjadi Rp 1,341 per kg dan penurunan harga TBS umur diatas 20 tahun dari Rp. 1,685/kg menjadi Rp. 1,249/kg. Jika dibandingkan dengan pekebun sawit plasma, harga TBS yang diterima petani sawit swadaya hanya sekitar 60-70 persen dari harga TBS tingkat PKS, akibat lokasi yang jauh dari PKS. Penurunan harga TBS di beberapa sentra produksi sawit juga berimplikasi pada penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan. Sehingga penurunan harga TBS petani sawit yang terus menerus akan berdampak pada penurunan kesejahteraan pekebun sawit pada sekitar 200 kabupaten di pelosok daerah.

Sementara itu, di dalam negeri harga produk hilir minyak sawit yakni minyak goreng curah masih relatif stabil dengan laju penurunan harga MGS (0.31 persen per tahun) dan harga biodiesel (0.9 persen per tahun). Jika dilihat dari sisi rasio harga minyak goreng curah dengan CPO (bahan bakunya) menunjukkan peningkatan, yang berarti harga minyak goreng curah relatif makin mahal terhadap harga CPO. Dengan rasio Januari 2017 sebagai tahun dasar, harga relatif minyak goreng curah terhadap CPO meningkat sekitar 58 persen pada Juli 2019. Kecenderungan yang sama terjadi pada biodiesel sawit (FAME) harga biodiesel relatif terhadap harga CPO, meningkat sebesar 30 persen pada posisi Juli 2019 dibandingkan posisi Januari 2017.

Untuk mengatasi dan mencegah masalah penurunan harga TBS berkepanjangan, pemerintah perlu mengambil kebijakan. Pemerintah perlu melakukan reformulasi penetapan harga TBS saat ini (Permentan No.01/2018). Formula harga TBS saat ini hanya mempertimbangkan harga CPO dan PKO.

Untuk formula harga TBS yang baru selain variabel harga CPO dan PKO, juga perlu memasukkan variabel harga minyak goreng sawit dan harga biodiesel sawit. Selain itu saat ini, pemerintah perlu mempercepat peningkatan mandatory biodiesel dari B20 ke B30 untuk meningkatkan penyerapan CPO domestik sehingga dapat mengangkat harga ditingkat petani. Dan untuk solusi kedepan adalah mengembangkan PKS greenfuel di sekitar petani sawit (sehamparan).

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Nilai Tukar Petani [internet]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Nilai Tukar Petani [internet]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Nilai Tukar Petani [internet]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Nilai Tukar Petani [internet]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id>
- [Kemenperin] Kementerian Perindustria Republik Indonesia. 2019. Bahan Presentasi: Kebijakan dan Strategi Hilirisasi Industri Kelapa Sawit sebagai Bagian dari Implementasi Roadmap Kelapa Sawit Nasional 2045.
- GAPKI. 2018. Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 dan Prospek 2019 [internet]. Tersedia pada: <http://gapki.id/news/>
- Immanuel .2018. *Price Transmission and The Effect Of Indonesia's Export Tax on Crude Palm Oil Prices*. [tesis]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor
- PASPI. 2016. *Mitos Vs Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global*. Edisi Ketiga. Bogor: PASPI
- PASPI. 2018. Anomali Harga CPO Dunia. *Monitor*. Volume 4(41): 1317-1322
- Sipayung T. 2018. *Politik Ekonomi Perkelapasawitan Indonesia*. Bogor: PASPI